

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan yaitu suatu kondisi yang dialami hampir setiap negara di seluruh dunia. Hingga saat ini kondisi kemiskinan menjadi permasalahan sosial sangat sulit di atasi karena memiliki sifat jangka panjang. Penyebab kemiskinan ada karena sebagian masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sampai pada taraf yang ditentukan oleh manusia (Purnama, 2017). Hal ini berdampak terhadap turunnya kualitas sumber daya manusia yang berakibat pada tingkat kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan yang semakin menurun.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih baik. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan, dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemiskinan merupakan masalah yang membutuhkan penanggulangan dan pendekatan sistematis, terpadu dan komprehensif untuk memenuhi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pengembangan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat (Fikri, R., Nurpratiwi, R., & Saleh, 2015).

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional.

Dampak kemiskinan sangatlah kompleks, orang miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga secara langsung akan berpengaruh pada tingkat kesehatan dan tingkat produktivitas. Dengan produktifitas yang rendah tersebut akan menyebabkan pendapatan yang diterima juga rendah, oleh sebab itu orang miskin akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Jhingan, 2007). Oleh karena itu jumlah penduduk miskin menjadi tujuan hal yang sangat penting dalam menilai berbagai efektifitas jenis program pembangunan.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dengan luas wilayah ± 4.659 Km² yang terbagi menjadi 17 Kecamatan. Sebagai upaya melakukan pembangunan daerah yang merata, maka pemerintah Kabupaten Bungo tentu harus melakukan belanja daerah secara adil dan merata agar memberikan manfaat yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan umum. Kabupaten Bungo sendiri merupakan salah satu Kabupaten penyumbang kemiskinan terbanyak di Provinsi Jambi. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan di Kabupaten Bungo.

World Bank (2010) mengartikan kemiskinan sebagai kurangnya kesejahteraan masyarakat. Masalah utama kemiskinan adalah sulitnya mendefinisikan apa sebenarnya arti kesejahteraan. Ketika kemiskinan dan kesejahteraan saling terkait, kemiskinan bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar yang menjamin kesejahteraan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber daya yang menopang kehidupan. Rendahnya pendapatan seseorang seringkali disalahartikan sebagai kurangnya akses.

Berdasarkan data garis kemiskinan Provinsi Jambi menurut kabupaten/ kota per November 2024, Kabupaten Bungo mengalami kenaikan angka garis kemiskinan sebesar 20,71 jiwa pada tahun 2024. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yaitu 20,71 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bungo belum berjalan secara optimal, khususnya di daerah pedesaan. Maka dari itu, pemerintah pusat mencanangkan kebijakan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di desa.

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bungo Periode 2002-2023

Tahun	Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2002	32.900	14,80
2003	29.500	12,44
2004	28.000	11,64
2005	23.700	9,79
2006	22.300	8,92
2007	19.600	7,63
2008	13.700	5,12
2009	14.600	5,32
2010	17.300	5,70
2011	16.700	5,35
2012	19.700	5,55
2013	17.300	5,25
2014	17.300	5,12
2015	19.520	5,70
2016	29.960	5,99
2017	20.810	5,82
2018	21.110	5,78
2019	20.870	5,60
2020	22.070	5,80
2021	23.640	6,23
2022	20.690	5,38
2023	20.650	5,29
Rata-Rata	21.450	7,01

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 mengenai rata-rata jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bungo selama periode tahun 2002-2023 tiap tahunnya cenderung mengalami fluktuasi. Dengan persentase rata-rata penduduk miskin sebesar 7,01%, rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 21,45 jiwa, rata-rata indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,06, rata-rata indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,26 dan

rata-rata garis kemiskinan di Kabupaten Bungo selama periode tahun 2002-2023 sebesar Rp. 263.71. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bungo terjadi dikarenakan faktor lapangan kerja yang sempit dan pertumbuhan pengangguran meningkat. Tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bungo dipengaruhi lambatnya pergerakan perekonomian dan ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Bungo yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki lahan perkebunan akan terjebak dalam kemiskinan. Selain penyebab terjadinya kemiskinan di atas, tentu juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Dengan mencari tahu kemiskinan, maka diharapkan dapat mengentasi kemiskinan, dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kemiskinan yang terjadi.

Faktor pertama yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi salah satu hal yang ingin dicapai oleh semua negara maupun daerah. Laju pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu.

PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang berada dalam suatu provinsi. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara redistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Bukan hanya itu, kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah serta semakin merajanya tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dalam suatu daerah. Berikut data PDRB di Kabupaten Bungo periode 2002-2023.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Bungo tahun 2002-2023 berfluktuasi akan tetapi cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 15,29% dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu menurun sebesar 6,44%, hal ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kebijakan. Secara umum, penurunan PDRB mengindikasikan adanya perlambatan atau kontraksi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 67,26%. PDRB sebagai ukuran aktivitas perekonomian masyarakat dalam menghasilkan tambahan pendapatan pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian sebagai proses penggunaan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan output. Efek multiplayer dari aktivitas ini adalah peningkatan produktivitas output. Dengan peningkatan output akan memberi pengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (PDB).

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran Terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia (Tambunan, 2001).

Pengangguran sendiri merupakan kondisi seseorang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan berdampak buruk apabila pengangguran semakin tinggi. Jika pengangguran tidak ditanggulangi akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah. Pada umumnya pengangguran disebabkan banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah sehingga tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Berikut data pengangguran di Kabupaten Bungo periode 2002-2023.

Perkembangan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bungo tahun 2002-2023 berfluktuasi akan tetapi cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 12,07% dengan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu menurun sebesar 33,34%, hal ini terjadi karena banyak nya perusahaan yang berdiri di

Kabupaten Bungo terutama perusahaan sawit yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang tinggi yang berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran di Kabupaten Bungo, sedangkan jumlah pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 55,65%, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan mengurangi jumlah karyawan nya akibat dari pandemic Covid-19.

Jika dilihat dari segi ekonomi faktor ketiga dari penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendapatan. Pembangunan nasional membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut didapatkan dari berbagai potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang didapat digunakan dalam program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Menurut (Pujiati 2008), dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD, akan memberikan peningkatan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Berikut data perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bungo tahun 2002-2023.

Rata-rata perkembangan jumlah pendaptan daerah di Kabupaten Bungo tahun 2002-2023 berfluktuasi cenderung meningkat dengan rata-rata perkembangan sebesar 4,04% dengan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu menurun sebesar 23,41%, sedangkan jumlah perkembangan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 17,36%.

Faktor selenajutnya yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan

menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah maka akan berakibat rendahnya produktivitas kerja seseorang dan menyebabkan berkurangnya pendapatan yang diterima sehingga masuknya seseorang dalam kemiskinan. Oleh karena itu perlu ada evaluasi lebih lanjut oleh pemerintah apakah proses pembangunan selama ini di Kabupaten Bungo ini sudah mendekati hasil yang optimal atau belum. Oleh karena itu diperlukan informasi tentang campur tangan pemerintah dalam pembangunan manusia sebagai modal pembangunan ekonomi di Kabupaten Bungo.

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bungo tahun 2002-2023 berfluktuasi cenderung meningkat dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,52% dengan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu menurun sebesar 7,09%, sedangkan jumlah perkembangan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 7,01%.

Pada dasarnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Amijaya (2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil riset yang menarik untuk dikaji, adapun judul penelitian ini yaitu “Determinan Kemiskinan di Kabupaten Bungo Periode 2002-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bungo menjadi masalah yang akan diteliti, dimana diperlukan adanya perkembangan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bungo, meliputi,

pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, jumlah penduduk, pendapatan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten Bungo peneliti tertarik untuk menganalisis apa saja yang mempengaruhi kemiskinan berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam penelitian ini dengan judul Analisis Ideks pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi pengangguran terbuka Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di kabupaten Bungo.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan kemiskinan, produk domestik regional bruto, pengangguran, jumlah penduduk, pendapatan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bungo selama priode 2002-2023.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bungo selama Periode 2002-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis, kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, pengangguran, jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bungo selama priode 2002-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bungo selama priode 2002-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya ya adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademisi

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan mengungkap faktor-faktoryang mempengaruhinya

2. Secara Praktis

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengentaskan masalah kemiskinan